

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai Politik menjadi salah satu pilar demokrasi yang masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan ini dapat melalui peningkatan dan pengembangan sistem kaderisasi dan rekrutmen keanggotaan yang kuat, serta memaksimalkan fungsi dari partai politik itu sendiri yaitu pendidikan politik. Pengkaderan dan rekrutmen politik dalam partai politik pun harus efektif, guna menghasilkan calon pemimpin yang memiliki kemampuan berpolitik yang kuat.

Menurut konstitusi, salah satu peran dari partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau pemilihan seseorang atau kelompok untuk memainkan berbagai peran dalam sistem politik (Waskita Aji, Asy'syari, & Tyesta, 2016). Tidak hanya berpolitik di lingkup partai politik saja, namun dapat menjadi calon pemimpin di tingkat daerah hingga nasional.

Rekrutmen ini sangat berkesinambungan dengan kaderisasi. Kaderisasi dapat diartikan sebagai proses internalisasi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya (Haris, et al., 2016). Dalam proses kaderisasi, para kader disiapkan oleh partai politik untuk menjadi fungsionaris partai dan menjadi calon pemimpin di pemerintahan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasanya partai politik merupakan 'kendaraan' guna mempersiapkan kader-kader terbaik partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Proses menyiapkan kader-kader terbaik itulah yang dinamakan dengan proses kaderisasi.

Menurut (Batubara, 2018), kaderisasi adalah proses persiapan atau pelatihan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menjabat posisi-posisi politik. Tujuan dari kaderisasi ini adalah untuk menciptakan kader yang berkualitas dan loyal terhadap partai politik dan calon pemimpin politik. Tidak semua anggota partai politik merupakan kader partai. Bagi anggota partai politik yang berminat untuk menjadi kader partai politik, mereka harus melewati tahap-tahap khusus yang diadakan oleh partai politik untuk menjadi kader partai politik atau yang dinamakan dengan proses kaderisasi.

Salah satu momentum bagi partai politik untuk menunjukkan keberhasilannya dalam proses kaderisasi dan rekrutmen politik ialah melalui ajang pemilihan tingkat lokal yaitu pemilihan kepala

daerah (pilkada) dalam ajang Pilkada, para partai politik biasanya berlomba-lomba dalam mendorong kader-kadernya agar dapat maju kedalam pemilihan tersebut. Pada 27 Juni 2018, Pilkada secara langsung dilaksanakan serentak di 171 daerah di Indonesia, daerah tersebut meliputi 17 provinsi, dan provinsi Jawa Barat termasuk di dalamnya. Pilkada langsung 2018 ini menjadi pilkada ketiga yang diadakan di Jawa Barat. Tujuan dari adanya Pilkada Jabar 2018 ialah bertujuan untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada periode 2018–2023 dan menggantikan Gubernur sebelumnya yaitu Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar sebagai wakilnya (2013-2018).

Dalam suatu pemilihan termasuk Pilkada, tidak semua partai politik dapat mengusung calon yang mereka pilih secara bebas. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2017 yang membahas mengenai pencalonan kepala daerah. Untuk dapat mencalonkan pilihannya, partai politik atau gabungan partai politik harus meraih sekurang-kurangnya 20% dari seluruh kursi DPRD Jabar atau 25% dari perolehan suara sah pada pemilu yang lalu. Partai politik yang belum memenuhi kursi akan tetap berkesempatan untuk mengajukan calon, asalkan dapat membentuk koalisi dengan partai lainnya. Berikut ini urutan partai politik di DPRD Jawa Barat 2014-2019:

Tabel 1. 1 Kursi DPRD JABAR 2014-2019

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDIP	20 kursi
2	Partai Golongan Karya	17 kursi
3	Partai Keadilan Sejahtera	12 kursi
4	Partai Demokrat	12 kursi
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 kursi
6	Partai Persatuan Pembangunan	9 kursi
7	Partai Kebangkitan Bangsa	7 kursi
8	Partai Nasional Demokrat	5 kursi
9	Partai Amanat Nasional	4 kursi
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3 kursi
Jumlah kursi	100 kursi	
Jumlah Partai	10 Partai	

Sumber: dikelola dari berbagai sumber

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kursi dari 10 partai yang ada di DPRD Jawa Barat Tahun 2014-2019. Dari 10 partai politik tersebut, PDI-P, Partai Golkar, PKS dan Partai Demokrat menjadi parpol teratas, dengan jumlah kursi terbanyak dimiliki oleh PDI-P yakni 20 kursi. Dari 10 partai politik yang ada, terbentuklah 8 fraksi DPRD Jawa Barat pada periode 2014-2019, yaitu; 1) fraksi Golkar-PAN, 2) fraksi PDI-P, 3) fraksi PKS, 4) fraksi Demokrat, 5) fraksi Gerindra, 6) fraksi PPP, 7) fraksi Nasdem-Hanura, dan 8) fraksi PKB, dengan jumlah kursi menjadi paling sedikit yaitu 7 kursi.

Pada Pilkada Jawa Barat 2018 terdapat 4 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Keempat pasangan calon tersebut memiliki *background* yang berbeda-beda. Peneliti akan menyajikan data mengenai keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Jawa Barat 2018. Hal tersebut dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 1. 2 Informasi Peserta Pilkada Jawa Barat 2018

No. Urut	Jargon & Slogan	Nama Pasangan Calon	Jabatan Sebelumnya	Asal Partai	Partai Pengusung
1	RINDU Jabar Juara Lahir Batin	Dr. (H.C.). H. Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	(Wali Kota Bandung periode 2013–2018)	-	Partai PPP, NasDem, PKB, dan Hanura. - Partai Pendukung: Partai PSI dan Partai Berkarya
		H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E.	(Bupati Tasikmalaya periode 2011–2018)	PPP	
2	HASANAH Hasanuddin- Anton Amanah	Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin	(Anggota Komisi I DPR RI), (Ketua DPD PDIP Jawa Barat 2012-sekarang)	PDIP	PDIP
		Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N.	(Mantan Kapolda Jabar 2016–2017)	PDIP	
3	ASYIK Ajat- Syaikhu	Mayjen TNI (Purn.) Sudrajat, M.P.A.	(Duta Besar RI untuk China 2005-2009)	Partai Gerindra	Partai Gerindra dan Partai PKS. - Partai Pendukung: PAN dan Partai PBB
		Ahmad Syaikhu	(Wali Kota Bekasi periode 2013–2018)	PKS	

4	2DM Bekerja Untuk Melayani	H. Deddy Mizwar, S.Sn., S.E., M.I.Pol.	(Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018)	Partai Demokrat	Partai Demokrat Partai Golkar - Partai Pendukung: Partai Perindro.
		H. Dedi Mulyadi, SH.	(Bupati Purwakarta periode 2013-2018), (ketua DPD Golkar Jabar periode 2016-2020)	Partai Golkar	

Sumber: dikelola dari berbagai sumber

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwasanya dari keempat pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Barat 2018 ini, hanya Ridwan Kamil lah yang merupakan sosok yang bukan berasal dari partai politik. Sementaranya yaitu Uu Ruzhanul Ulum merupakan kader dari partai PPP. Walaupun Ridwan Kamil bukan seorang kader dari partai politik mana pun, namun beliau mendapatkan banyak dukungan dari berbagai partai politik. Adapun koalisi partai yang mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018 adalah; Partai NasDem, PPP, PKB, dan Hanura. Tak berhenti disitu, pasangan ini pun didukung oleh Partai PSI dan Partai Berkarya. Pengusungan oleh empat partai ini mengingatkan pada Pilkada Jawa Barat 2013 yaitu pasangan Ahmad Heryawan dan Dedi Mizwar yang berhasil memenangkan kontestasi karena didukung oleh empat partai yaitu PKS, PPP, Hanura dan PBB.

Kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Uu Rizhanl Ulum ini menjadi bukti dari keberhasilan partai koalisi pengusung pasangan calon ini. Namun disisi lain peneliti mengasumsikan bahwa belum maksimalnya fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dari partai politik pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, yang mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya partai politik itu ada untuk melahirkan kader-kader pemimpin bangsa. Untuk membantu penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasikan partai politik pengusung Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018:

Tabel 1. 3 Klasifikasi Partai Pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018

No.	Nama Partai	Klasifikasi Partai	Ciri-ciri
1	PPP	Partai <i>Catch All</i>	Berdasarkan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Batubara, 2018), PPP dapat dikategorikan sebagai partai yang memiliki ciri-ciri dari partai massa dan partai kader. Selain mengandalkan dukungan dari jumlah anggota yang besar atau massa, partai ini juga memiliki

			elemen partai kader. Partai ini memberikan prioritas pada ketaatan terhadap organisasi dan disiplin anggotanya. Klasifikasinya sebagai partai kader didasarkan pada sistem pengkaderan yang berjenjang yang dimiliki oleh Partai PPP.
2	PKB	Partai Kader	AD/ART adalah fondasi hukum yang paling penting dalam Partai Kebangkitan Bangsa setelah prinsip dasar politiknya diatur dalam Mabda Siyasi. Semua langkah-langkah, keputusan, dan kinerja yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, baik dari tingkat bawah sampai dengan tingkat pusat harus mengacu pada AD/ART. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, PKB menyatakan bahwa dirinya merupakan partai kader, sebab terdapat tingkatan-tingkatan dalam kaderisasi dan kaderisasi menjadi hal yang utama di partai ini.
3	NasDem	Partai Massa	Dari hasil penelitian (Baalwy, 2012), Partai NasDem melakukan perekrutan kader sebanyak-banyaknya serta membuat perancangan struktur kepengurusan partai di segala tingkatan serta membentuk banyak organisasi sayap guna memperkuat basis massa dan persiapan menghadapi parpol lain dalam ajang pemilihan.
4	Hanura	Elit	Sejak didirikan pada tahun 2006, partai tersebut telah diidentifikasi dengan sosok Wiranto sebagai tokoh sentralnya. Pada saat yang sama, Wiranto juga diusung sebagai calon presiden dalam Pemilu 2009. Partai ini cenderung menempatkan legitimasi partainya pada figur sentral atau ketuanya. Hal ini termasuk dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi kebijakan partai. Kekuatan figur tersebut juga menjadi faktor dari terjadinya perpecahan di dalam partai.

Sumber: dikelola dari berbagai sumber

Tabel 1.3 menunjukkan klasifikasi partai pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018. Dapat dilihat bahwasanya keempat partai pengusung Ridwan Kamil yakni Uu Ruzhanul Ulum diklasifikasikan menjadi 3 jenis partai, yakni partai kader, partai *elite* dan partai *catch all*. Pengklasifikasian partai tersebut dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing partai, dan beberapa partai menggunakan AD/ART sebagai acuan pengklasifikasian. Adapun hasil pengklasifikasian tersebut ialah partai PPP termasuk kedalam partai *catch all*, partai PKB merupakan partai kader, Partai NasDem adalah partai massa

dan partai Hanura merupakan partai *elite*. Dengan pengklasifikasian ini dapat dilihat apakah partai politik mengutamakan kualitas kader atau kuantitas kader, atau hanya untuk memenangkan Pemilu saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola kaderisasi partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018?
2. Bagaimana proses rekrutmen partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018?
3. Mengapa partai politik memutuskan untuk mengusung kandidat dari non-kader partai politik pada Pilkada Jawa Barat 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kaderisasi dari partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018.
2. Untuk mengetahui proses rekrutmen partai politik pengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilkada Jawa Barat 2018.
3. Untuk memahami maksud partai politik dalam mengusung kandidat non-kader partai politik pada Pilkada Jawa Barat 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memperluas wawasan mengenai kaderisasi partai politik.
2. Untuk memperluas wawasan mengenai rekrutmen politik.
3. Untuk menambahkan penelitian mengenai Pilkada Jawa Barat 2018.
4. Dapat menjadi referensi bagi para pembaca yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Untuk menambah koleksi hasil-hasil penelitian, khususnya yang menyangkut partai politik dan pemilihan gubernur di Jawa Barat pada tahun 2018.
3. Sebagai bahan tinjauan bagi partai politik guna mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang lebih baik.

